



PUTUSAN
Nomor 274/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rizki Muchammad Nur Hidayat.;

Tempat/ Tanggal lahir : Jakarta, 01 Februari 1992, NIK : 3306080102920001, Laki-laki, Islam, WNI, SMA, Karyawan Buruh, Kawin, bertempat tinggal di Perumahan Bhayangkara, RT.05/ RW.03, Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) beralamat di Kantor Pusat Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai, Bunulrejo, Blimbing Telpon : 0341-492174 Kota Malang 65123 - Jawa Timur, Indonesia, Kantor Perwakilan Purworejo: Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg Cempaka, Blok C4-19, RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor :373/SK/2020 tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

L a w a n

PT. MPm finance Kancab Yogyakarta ;

berkedudukan di Jalan Ringroad Utara, Jombor, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

PT.MPm finance Kancab Yogyakarta

berkedudukan di Jalan Ringroad Utara, Jombor, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Juli 2021 Nomor 274/Pdt/2021/PT. SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat

Halaman 1 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



gugatannya tertanggal 26 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Register Perdata dibawah Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. telah mengemukakan tentang hal-hal gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan:

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di mana tempat kedudukan konsumen;

untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman Penggugat;

2. Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai driver online mitra GRAB yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan: 0016/ MTP/ IV /20;
3. Bahwa Penggugat pada bulan Februari 2019 bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk : DAIHATSU
Type : SIGRA-1.2X M/T
Jenis : MPNP/MINIBUS
Tahun Pembuatan : 2018
No. Rangka : MHKS6GJ3JJJ020055
No. Mesin : 3NRH314871
Warna : PUTIH
No. Polisi : AA-9248-KC
Atas nama : Rizki Muchammad Nur Hidayat

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 Februari 2019 mengabdikan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan No.: 8472018103000375, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak Tergugat diwakili oleh ANTON WIJANARKO sebagai Bussiness Manager serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp 128.721.841.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;
5. Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 17 kali cicilan, atau sejumlah Rp 3.210.000,- x 17 = Rp 54.570.000,-, sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat



terhadap 1 (satu) unit Kendaraan SIGRA-1.2X M/T No. Polisi : AA-9248-KC adalah sebesar Rp 15.000.000,- + Rp 54.570.000,- = Rp 69.570.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat bernia untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;
8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;
9. Bahwa benar Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, namun Penggugat beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi Penggugat benar-benar pulih, dan Penggugat meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo)
10. Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan Penggugat beberapa kali didatangi oleh Debt Kolektor yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat bernia untuk merampas jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7 yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor



1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
 - a. KUHPerdata Pasal 1365
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait force majeure (keadaan memaksa), "***Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini***



membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeure pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori force majeure atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah”;

2. Bahwa acuan dalam pembahasan force majeure berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” Dan Pasal 1245 KUH Perdata, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:
 - a. Adanya kejadian yang tidak terduga;
Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;
 - b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;
 - c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;
 - d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur
Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)
4. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan force majeure (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
6. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri



oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;

7. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 17 Oktober 2024;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 17 Oktober 2024 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 17 Oktober 2024;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij voorraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara persidangan elektronik sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM



1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 4 yang pada pokoknya mendalilkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan No. 8472018103000375 pada tanggal 6 Februari 2019 ;
 2. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019 dengan PENGGUGAT ;
 3. Bahwa lahirnya hubungan hukum antara PENGGUGAT i.c. RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT sebagai DEBITOR dan TERGUGAT i.c. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai KREDITOR adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018, yang telah dimuat dan dibukukan melalui Akta Jaminan Fidusia Nomor : 549 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00802821.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 ;
 4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 bertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan :
Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;
Dengan demikian, berdasarkan peristiwa hukum dan yurisprudensi yang telah diuraikan TERGUGAT, maka secara keperdataan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki hubungan hokum pada Perjanjian Pembiayaan Februari 2019 sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan a quo sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat TERGUGAT, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum yang terang dan jelas ;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;
- B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**
1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 7 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 51/Pdt.G/2020/PN.Pwr, dalam hal ini antara PENGGUGAT i.c. RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT melawan TERGUGAT i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ;

2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 bermaterai cukup ditandatangani oleh RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT selaku DEBITOR i.c. PENGGUGAT dan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT ;
4. Bahwa perjanjian a quo dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang ;
5. Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

16.1 Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Pembiayaan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk mufakat ;

16.2 Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM



Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia ;

Dengan demikian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan terhadap perjanjian a quo ;

6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) dan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dengan demikian, persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian a quo mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk beritikad baik (good faith) mentaati dan melaksanakannya ;

Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan :

Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hokum siapa terletak tempat kedudukayang dipilih itu ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya yang berwenang mengadili perkara a quo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disetujui dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa



Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang _____ mengadili perkara karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

C. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI NON JUDICIO)

1. Bahwa dalam perkara a quo, gugatan diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara 51/Pdt.G/2020/PN.Pwr yang mendalilkan bertindak mewakili kepentingan konsumen yang dirugikan yakni RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT i.c DEBITOR ;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT bertanggal 26 November 2020 dan Surat Kuasa PENGGUGAT bertanggal 3 November 2020 seluruhnya ditandatangani oleh NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH., Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada kantor LPKNI yang menggunakan kop surat dan cap stempel atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) ; Dengan demikian, NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH. bertindak bukan sebagai Advokat secara pribadi namun bertindak atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) ;
3. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen maka Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui diajukannya gugatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
 - (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

Halaman 10 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Lebih lanjut, menurut Maijers suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya ;
 2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum ;
 3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang ;
 4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya ;
4. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT bertanggal 26 November 2020 Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyatakan berstatus sebagai FIRMA HUKUM, tetapi tercantum kop surat dan cap stempel sebagai PERSEROAN. Kontradiksi status badan usaha juga terdapat pada Surat Kuasa PENGGUGAT bertanggal 3 November 2020 Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyatakan berstatus sebagai FIRMA HUKUM, tetapi tercantum kop surat dan cap stempel sebagai PERSEROAN sehingga status badan usaha Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak jelas dan kabur ;
5. Bahwa ketidakjelasan bentuk badan usaha tersebut juga mengakibatkan ketidakjelasan status badan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) sehingga Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikarenakan yang memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atas pelanggaran konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yakni berbadan hukum atau yayasan; berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
6. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak

Halaman 11 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo (legitima persona standi in iudicio) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA BENTUK USAHA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK JELAS SEHINGGA MENGAKIBATKAN SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa setelah mencermati isi Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19, justru memaksa dan mengancam PENGGUGAT akan mengambil jaminan milik PENGGUGAT, ternyata terdapat kontradiksi mengenai bentuk usaha LPKNI dalam Gugatan PENGGUGAT dan Surat Kuasa PENGGUGAT yang saling bertentangan ;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 1, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI yakni : NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) ..

Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk FIRMA HUKUM ;

Namun pada setiap halaman Gugatan PENGGUGAT, tercantum KOP Surat (bagian atas surat yang berisi keterangan tentang nama dan suatu badan usaha) yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Perseroan). Dari KOP Surat tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk PERSEORAN.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Kuasanya bertanggal 3 November 2020, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI

Halaman 12 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



yakni :

NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) ..

Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk FIRMA HUKUM ;

Namun surat kuasa tersebut di cap stempel logo LPKNI yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Perseroan). Dari stempel tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk PERSEROAN.

4. Bahwa perbedaan bentuk usaha yang saling bertolakbelakang antara FIRMA HUKUM dan PERSEROAN yang terdapat pada Gugatan PENGGUGAT dan SURAT KUASA mengakibatkan Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sehingga Surat Kuasa PENGGUGAT cacat formil, untuk itu Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak berhak mewakili kepentingan PENGGUGAT pada perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 51/Pdt.G/2020/PN.Pwr, maka terdapat pihak-pihak dalam gugatan a quo, antara lain :
 - a. RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT sebagai PENGGUGAT;
 - b. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai TERGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini lembaga pembiayaan yang mendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK

Halaman 13 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



INDONESIA (OJK RI) terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;

3. Bahwa didalam gugatannya, PENGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGUGAT pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ;
4. Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana salah satu kebijakannya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini adalah mengeluarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, maka seharusnya PENGUGAT dalam gugatannya menarik/melibatkan OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK dalam perkara a quo karena memiliki kapasitas sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT selaku lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan;
5. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya yakni :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;
- d. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel ;

Halaman 14 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



- e. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya ;
6. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (plurium litis consortium). Dengan demikian, kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PENGGUGAT mengakibatkan gugatan a quo cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO); Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO).

F. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 mengatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

16.1 Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Pembiayaan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk mufakat ;

16.2 Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia ;

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 15 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan Halaman 457, menjelaskan :

Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih premature, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Mengenai sifat dan keadaan premature melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai ;

Dengan demikian, berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap maka Gugatan PENGGUGAT Prematur karena seharusnya sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berhubungan dengan perjanjian a quo diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum.

4. Bahwa pada perkara a quo PENGGUGAT juga tidak mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya Covid-19 kepada TERGUGAT berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum timbul sengketa keperdataan karena belum terjadi perbuatan hukum yang baru ;
5. Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo, PENGGUGAT belum pernah menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan tidak pula mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak daridanya Covid-19 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO).

G. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SINKRON

1. Bahwa inkonsistensi dan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (rechtelijke grond) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (feitelijke grond) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan a quo tidak jelas/kabur (obscuur libel), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a

Halaman 16 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal :

Pasal 6 Ayat (1)

Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen ;

Pasal 49

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen ;

Pasal 50

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen ;

3. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan ;

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen ;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen ;
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :

Halaman 17 dari 50 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



- a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen ; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen ;
4. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGGUGAT dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGGUGAT menuduh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan a quo, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

Oleh karenanya, Gugatan PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENSI uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI ;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka perkenankan TERGUGAT KONVENSI untuk menyampaikan kronologi dari awal hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI lahir hingga berperkara pada Pengadilan Negeri Purworejo, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut :

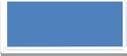


NO.	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	20 Oktober	Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375, antara PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR dengan RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT selaku DEBITOR ; Terhadap perjanjian	PENGGUGAT KONVENSI i.c. RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan pada TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan objek



		<p>tersebut telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 549 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat ;</p> <p>Terhadap objek jaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00802821.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah ;</p>	<p>pembiayaan berupa kendaraan :</p> <p>Jumlah Unit 1 (satu), Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JJ02005 5, Nomor Mesin 3NRH314871, Warna WHITE,</p> <p>Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T, Tahun 2018, Kondisi BARU, Dokumen Atas Nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;</p> <p>Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan ;- Dimulai pada tanggal 17 November 2018 ;- Angsuran berakhir tanggal 17 Oktober 2023;
--	--	--	---



2.	 17 Mei	Tanggal jatuh tempo angsuran ke-19 (sembilan belas) ; DEBITOR terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-18 tanggal jatuh tempo 17 April 2020 ;	Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (good faith) mengirimkan surat penagihan dan peringatan kepada PENGGUGAT KONVENSI, antara lain : - Surat No. Ref : 847SP120200037 2 perihal Penagihan bertanggal 27 Mei 2020 ; - Surat No. Ref : 847SP220200024 1 perihal Penagihan dan Peringatan bertanggal 31 Mei 2020 ; Namun sangat disayangkan, PENGGUGAT KONVENSI tidak menanggapi surat penagihan dan peringatan yang
----	--	--	--



			dikirimkan TERGUGAT KONVENSI ;
3.	07 Desember	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara : 51/Pdt.G/2020/PN.Pwr oleh LPKNI selaku Kuasa Hukum DEBITOR;	Menunjukkan terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI i.c RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT terhadap TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE CABANG YOGYAKARTA yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo ;
4.	 Januari	Objek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya ;	TERGUGAT KONVENSI selaku KREDITOR sebagai PENERIMA FIDUSIA sampai dengan sekarang tidak mengetahui objek jaminan fidusia dimana keberadaannya berupa kendaraan : Jumlah Unit 1 (satu), Nomor



			Rangka/Seri MHKS6GJ3JJJ02005 5, Nomor Mesin 3NRH314871, Warna WHITE, Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA- 1.2 X M/T, Tahun 2018, Kondisi BARU, Dokumen Atas Nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;
--	--	--	--

4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman PENGGUGAT KONVENSI yang dilandasi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat dan keliru, karena :
- 1) Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang dapat diajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan Peradilan. Gugatan a quo bukan termasuk jenis sengketa yang dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) ;
 - 2) PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018. Untuk itu, PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian a quo ;
5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI bekerja sebagai driver online mitra GRAB. Dalil tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT KONVENSI saat dilakukan

Halaman 23 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



survei pembiayaan multiguna oleh TERGUGAT KONVENSI. Ketika dilakukan survei, PENGGUGAT KONVENSI memberikan keterangan dan mengaku sebagai STAFF di PT. KAI. Apabila yang disampaikan pada Gugatan PENGGUGAT KONVENSI bahwasanya objek jaminan fidusia dipergunakan untuk selain daripada hasil analisa sehingga disetujui permohonan kredit yang diajukan PENGGUGAT KONVENSI, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 3 yang pada pokoknya menyebutkan identitas objek jaminan fidusia. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban PENGGUGAT KONVENSI selaku DEBITOR kepada TERGUGAT KONVENSI selaku KREDITOR maka TERGUGAT KONVENSI menerima BARANG JAMINAN secara fidusia berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JJ020055 ;
- Nomor Mesin : 3NRH314871 ;
- Warna : WHITE ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;

Peristiwa hukum tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2018 bukan pada bulan Februari 2019 sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT KONVENSI pada dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 3 ;

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI



menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 8472018103000375 bertanggal 6 Februari 2019. Lahirnya hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI berasal dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 bermaterai cukup ditandatangani oleh RIZKI MUCHAMMAD NUR HIDAYAT selaku DEBITOR dan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR bukan pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019 seperti yang didalilkan PENGGUGAT KONVENSI dalam gugatan a quo. Dengan demikian, berdasarkan peristiwa hukum tersebut, telah jelas apabila antara PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI tidak memiliki hubungan hukum pada Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 6 Februari 2019 sehingga PENGGUGAT KONVENSI tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat TERGUGAT KONVENSI, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum yang terang dan jelas ;

8. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 5 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI sejumlah 17 kali cicilan atau sejumlah Rp. 54.570.000,-. Terhadap angsuran yang telah dibayarkan tersebut maka berdasarkan catatan resmi TERGUGAT KONVENSI yang tercantum pada dokumen Agreement Card Nomor : 8472019103000210 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT i.c. PENGGUGAT KONVENSI menunjukkan oustanding hutang PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 134.820.00,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 6 dan nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI selama adanya Covid-19 mengalami kesulitan membayar angsuran dan tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan. PENGGUGAT KONVENSI selama ini tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID-19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ;

Halaman 26 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



10. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Purworejo setelah Gugatan Class Action pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak sah sehingga pemeriksaan perkara dihentikan melalui putusan hakim adalah tidak tepat dan keliru. Perihal domisili hukum sudah TERGUGAT KONVENSI jawab pada Nomor 4 DALAM KONVENSI diatas. PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018, sehingga PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian a quo ;
11. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengakui adanya keterlambatan pembayaran angsuran secara berturut-turut. Berdasarkan dokumen Agreement Card Nomor : 8472019103000210 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT i.c. PENGGUGAT KONVENSI menunjukkan PENGGUGAT KONVENSI terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-18 tanggal jatuh tempo 17 April 2020. Selanjutnya, pada angsuran ke-19 dan seterusnya PENGGUGAT KONVENSI tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali. Untuk itu, mohon pernyataan tersebut dicatat dan dianggap sebagai alat bukti PENGAKUAN PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan :
Pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah 'cidaera janji' sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) ;
Lebih lanjut, pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 109/Pdt.G/2017/PN.Rap Majelis Hakim berpendapat :
Bahwa pengakuan yang dibenarkan secara sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak tersebut kepada pihak lain ;

Halaman 27 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



Dengan demikian, dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang mengakui PENGGUGAT KONVENSI telah lalai melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR merupakan fakta hukum cedera janji/wanprestasi yang disampaikan sendiri oleh PENGGUGAT KONVENSI ;

12. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI tidak menerima keringanan kredit sebagai dampak adanya Covid-19 adalah tidak tepat dan keliru. PENGGUGAT KONVENSI tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan karena PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT KONVENSI sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI ;

13. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Penting untuk digaris bawahi, TERGUGAT KONVENSI sampai dengan sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia dan tidak pernah melakukan ancaman ;

14. Bahwa tidak benar dan keliru kutipan dasar hukum pada dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal :

Pasal 6 Ayat (1)

Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen ;

Pasal 49

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen ;

Pasal 50

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen ;

Setelah TERGUGAT KONVENSI membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan ;

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen ;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen ;
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen ; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen ;

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT KONVENSİ diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT KONVENSİ dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGUGAT KONVENSİ menuduh TERGUGAT KONVENSİ telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Dikarenakan Gugatan PENGUGAT KONVENSİ mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan a quo, maka Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

15. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSİ nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSİ memenuhi

Halaman 29 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



unsur perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). PENGGUGAT KONVENSI keliru dalam menguraikan unsur-unsur tersebut. TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR yang beritikad baik (good faith) memberikan kesempatan kepada setiap debitor yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya Covid-19 dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit/pembiayaan oleh DEBITOR sebagai PEMOHON dan setelahnya segera ditindaklanjuti oleh TERGUGAT KONVENSI. Namun, PENGGUGAT KONVENSI selaku DEBITOR tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI. Selain itu, tanpa alasan yang jelas PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-19 sampai dengan sekarang, bahkan TERGUGAT KONVENSI sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia. Disisi lain, TERGUGAT KONVENSI beritikad baik (good faith) mengirimkan surat penagihan dan peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada PENGGUGAT KONVENSI tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dengan demikian, perbuatan PENGGUGAT KONVENSI yang beritikad buruk (bad faith) dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR termasuk dalam kualifikasi perbuatan cidera janji/wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;

16. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 15, nomor 16, nomor 17 dan nomor 18 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun dengan alasan adanya keadaan force majeure adalah tidak tepat dan keliru. Terhadap keringanan kredit/pembiayaan, TERGUGAT KONVENSI dapat memberikan bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga atau hal lain yang ditetapkan TERGUGAT KONVENSI dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit terdampak Covid-19. Disini, PENGGUGAT KONVENSI salah menafsirkan kebijakan terkait relaksasi kredit. Tanpa adanya permohonan, TERGUGAT KONVENSI tidak dapat mengidentifikasi apakah PENGGUGAT KONVENSI terdampak Covid-19 atau tidak sehingga tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud PENGGUGAT

Halaman 30 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



KONVENSI. Restrukturisasi ini mensyaratkan itikad baik (good faith) DEBITOR, artinya DEBITOR harus berkomunikasi dengan KREDITOR untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan objek jaminan fidusia, bukan justru PENGGUGAT KONVENSI sengaja tidak membayarkan angsuran, tidak mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan dan tidak memberitahukan keberadaan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT KONVENSI, sehingga dari rangkaian fakta/peristiwa tersebut terlihat perbuatan PENGGUGAT KONVENSI yang beritikad buruk (bad faith) ;

17. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 19 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta Covid-19 termasuk keadaan force majeure kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) telah mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia melalui POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang telah menjelaskan cara dan syarat mendapatkan relaksasi kredit/pembiayaan antara lain :

- 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka ;
- 2) Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing) ;
- 3) Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait;

Selama ini PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan kepada TERGUGAT

Halaman 31 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



KONVENSI sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat melakukan assesment relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI.

Untuk itu, status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak serta merta dapat menjadi alasan menunda atau membatalkan perjanjian terhadap DEBITOR yang cidera janji/wanprestasi dengan alasan force majeure karena PENGGUGAT KONVENSI masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai DEBITOR ;

18. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 20 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta perlindungan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghindari upaya main hakim sendiri oleh TERGUGAT KONVENSI dengan cara perampasan objek jaminan fidusia selama masa persidangan melalui putusan sela adalah tidak berdasar dan beralasan. Ketakutan dan kecemasan PENGGUGAT KONVENSI akan proses eksekusi objek jaminan fidusia merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat kesalahannya sendiri melakukan cidera janji/wanprestasi. Itikad baik (good faith) yang dilakukan TERGUGAT KONVENSI berupa mengirimkan surat penagihan dan peringatan sebanyak 2 (kali) kali serta memberikan kesempatan melalui program keringanan kredit/pembiayaan tidak direspon dan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PENGGUGAT KONVENSI sehingga dapat dikatakan PENGGUGAT KONVENSI telah melepaskan hak-haknya tersebut atas kemauannya sendiri ;
 19. Bahwa tuntutan PENGGUGAT KONVENSI pada dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 21, nomor 22 dan nomor 23 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;
 20. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;
- Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan REKONVENSI terhadap perkara a quo adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



III. DALAM REKONVENS

1. Bahwa dalam hal ini semula TERGUGAT KONVENS I menjadi PENGGUGAT REKONVENS I mengajukan GUGATAN REKONVENS I terhadap semula PENGGUGAT KONVENS I menjadi TERGUGAT REKONVENS I ;
2. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I uraikan didalam bagian EKSEPS I DAN JAWABAN TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam GUGATAN REKONVENS I ini ;
3. Bahwa TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I menolak seluruh dalil-dalil GUGATAN KONVENS I yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENS I/TERGUGAT REKONVENS I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENS I/PENGGUGAT REKONVENS I ;
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 antara PENGGUGAT REKONVENS I i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENS I i.c. RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT telah bersepakat dan tunduk serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 dengan total nilai pembiayaan sejumlah Rp. 128.721.841,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan bunga sejumlah Rp. 63.878.160,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JJJ020055 ;
- Nomor Mesin : 3NRH314871 ;
- Warna : WHITE ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang :

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



- Jangka waktu pembiayaan : 60 (enam puluh) bulan ;
- Dibayar dalam : 60 (enam puluh) kali angsuran ;
- Dimulai pada tanggal : 17 November 2018 ;
- Angsuran berakhir tanggal : 17 Oktober 2023 ;

Untuk itu masing-masing pihak telah dibebani suatu kewajiban yaitu PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai KREDITOR dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT sebagai DEBITOR ;

5. Bahwa terhadap perjanjian a quo telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 549 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor : W13.00802821.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 ;
6. Bahwa berdasarkan dokumen Agreement Card Nomor : 8472019103000210 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT i.c. PENGUGAT KONVENSI, menunjukkan TERGUGAT REKONVENSI terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-18 tanggal jatuh tempo 17 April 2020 dan pada angsuran berikutnya TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONVENSI tersebut dikualifikasikan sebagai cidera janji/wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yakni objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh PENGUGAT REKONVENSI atau secara sukarela TERGUGAT REKONVENSI menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT REKONVENSI ;
7. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP1202000372 perihal Penagihan bertanggal 27 Mei 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGUGAT REKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 3.366.500,- (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) belum dilunasi, dengan rincian :
 - Angsuran : Rp. 3.210.000,-
 - Denda Keterlambatan : Rp. 96.500,-
 - Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-

Halaman 34 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



- Visit Fee : Rp. 60.000,- ;
8. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP2202000241 perihal Penagihan dan Peringatan bertanggal 31 Mei 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGGUGAT REKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) belum dilunasi, dengan rincian :
- Angsuran : Rp. 3.210.000,-
 - Denda Keterlambatan : Rp. 209.000,-
 - Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-
 - Visit Fee : Rp. 120.000,- ;
9. Bahwa setelah Surat Penagihan, Surat Penagihan & Peringatan disampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSI, sangat disayangkan TERGUGAT REKONVENSI tetap beritikad buruk (bad faith) tidak melakukan pembayaran tunggakan angsuran dan juga tidak melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;
10. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan :
Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) ;
Sebagaimana ketentuan tersebut telah dipenuhi PENGGUGAT REKONVENSI melalui Pasal 8 Ayat (8.1) huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 yang pada pokoknya berisi mengenai kapan DEBITOR dinyatakan CIDERA JANJI dijelaskan sebagai berikut :
- 8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, cukup telah terbukti dengan :
- a) Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang



sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya ;

Lebih lanjut mengenai konsekuensi yuridis dari perbuatan cidera janji/wanprestasi telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri ;

Pasal 29 ayat (1) huruf a

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;

Pasal 30

Pemberia Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia ;
Dengan demikian, konsekuensi yuridis akibat TERGUGAT REKONVENSI melalaikan kewajibannya sebagai DEBITOR (cidera janji/wanprestasi) yaitu PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai wewenang dan berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia walaupun dalam penguasaan orang lain serta dimanapun objek jaminan fidusia berada atau TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;

11. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan CIDERA JANJI/WANPRESTASI terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 sebagaimana telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa

Halaman 36 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



Tengah Nomor : W13.00802821.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 sehingga Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI sudah selayaknya dapat dibuktikan ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (8.4) huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 yang menyatakan :

8.4 Dalam hal berakhirnya Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3 tersebut diatas, maka MPM Finance berhak sebagaimana Debitur berkewajiban untuk :

- a. MPM Finance berhak untuk menuntut pembayaran lunas kepada Debitur atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana Debitur berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran lunas kepada MPM Finance, termasuk namun tidak terbatas pada :

- 1) Semua jumlah hutang pokok (nilai pembiayaan), dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disebut dalam Perjanjian Pembiayaan.
- 2) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh MPM Finance, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya Notaris, biaya pengambilan / penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang Jaminan dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Debitur.

Dengan demikian, jumlah seluruh biaya-biaya sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan perjanjian a quo menjadi tanggungjawab dari TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA ;

13. Bahwa mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI, telah dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (5.3) dan Ayat (5.4) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan

Halaman 37 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Pembayaran Kembali

- 5.3 Untuk setiap kali keterlambatan pembayaran uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan kepada MPM Finance, Debitur wajib membayar kepada MPM Finance Denda Keterlambatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dan membayar Biaya Kunjungan atas angsuran yang tertunggak sesuai ketentuan MPM Finance dalam hal MPM Finance mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Debitur.
- 5.4 Setiap pembayaran oleh Debitur kepada MPM Finance akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh MPM Finance dengan urutan prioritas sebagai berikut (atau dengan urutan lain yang sepenuhnya ditentukan oleh MPM Finance), yaitu : (a) semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh MPM Finance untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan setiap perjanjian yang berkenaan serta Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, (b) premi asuransi yang tertunggak, (c) denda yang tertunggak, termasuk denda keterlambatan, (d) angsuran.

Dengan demikian, perhitungan biaya denda keterlambatan, biaya kunjungan dan biaya pengacara yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang telah dipergunakan dan dibukukan dengan urutan prioritas oleh PENGGUGAT REKONVENSİ i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA merupakan bukti yang sah dan mengikat TERGUGAT REKONVENSİ i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA

14. Bahwa berdasarkan Pendapat Subekti, hukuman bagi DEBITOR yang lalai (cidera janji/wanprestasi) adalah sebagai berikut :
- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;
 - 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian ;
 - 3) Peralihan resiko ;
 - 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim ;

Halaman 38 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



Lebih lanjut, mengenai ganti kerugian akibat cedera janji/wanprestasi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut :

Pasal 1239 KUH Perdata

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya ;

Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan ;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan PENGGUGAT REKONVENSI diatas, maka Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya ;
16. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 549 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00802821.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 ;
17. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;
18. Bahwa terhadap perbuatan cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan :

Halaman 39 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JJJ020055 ;
- Nomor Mesin : 3NRH314871 ;
- Warna : WHITE ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;

19. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JJJ020055 ;
- Nomor Mesin : 3NRH314871 ;
- Warna : WHITE ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;

20. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JJJ020055 ;
- Nomor Mesin : 3NRH314871 ;
- Warna : WHITE ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;

21. Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA, maka

Halaman 40 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



PENGGUGAT REKONVENSI i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA mengalami kerugian dengan rincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI	Nominal	Keterangan
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 134.820.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan outstanding hutang per tgl 4 Januari 2021
Biaya Denda	Rp. 16.019.500,- (enam belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan nilai denda per tgl 4 Januari 2021
Biaya Kunjungan	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan visit fee per tgl 4 Januari 2021
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
JUMLAH	Rp. 200.959.500,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	-

Kerugian Immateril :

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI



mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Total kerugian :

Kerugian Materiil	Rp. 200.959.500,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
TOTAL KERUGIAN	Rp. 210.959.500,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

22. Bahwa terhadap hal-hal yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, maka kami mohon putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uit verbaar bij voorraad) ;

23. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ meminta agar TERGUGAT REKONVENSİ patuh dan menjalankan putusan a quo ;

24. Bahwa terhadap biaya yang timbul pada perkara a quo mohon dibebankan demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONVENSİ sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban TERGUGAT dan Gugatan Rekonvensi bertanggal 2 Maret 2021 ;

Halaman 42 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo (persona standi non judicio) ;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena bentuk usaha lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak jelas sehingga mengakibatkan surat kuasa PENGGUGAT KONVENSİ cacat formil;
5. Menyatakan PENGGUGAT KONVENSİ tidak memiliki legal standing untuk menggugat TERGUGAT KONVENSİ karena antara PENGGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT KONVENSİ tidak mempunyai hubungan hukum ;
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ kurang pihak (plurium litis consortium) ;
7. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ prematur ;
8. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena dasar hukum Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ tidak jelas dan tidak sinkron ;
9. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;
10. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT KONVENSİ ;

II. DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSİ tidak dapat diterima (Nietontvankelijkverklaard/NO) ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini demi hukum;

III. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 549 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat ;

Halaman 43 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.00802821.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 ;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan CIDERA JANJİ/WANPRESTASI dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan :
Jumlah Unit 1 (satu) ; Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JJ020055 ; Nomor Mesin 3NRH314871 ; Warna WHITE ; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ; Tahun 2018 ; Kondisi BARU ; Dokumen Atas Nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;
7. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan :
Jumlah Unit 1 (satu) ; Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JJ020055 ; Nomor Mesin 3NRH314871 ; Warna WHITE ; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ; Tahun 2018 ; Kondisi BARU ; Dokumen Atas Nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;
8. Menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSİ adalah sah demi hukum berupa kendaraan :
Jumlah Unit 1 (satu) ; Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JJ020055 ; Nomor Mesin 3NRH314871 ; Warna WHITE ; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ; Tahun 2018 ; Kondisi BARU ; Dokumen Atas Nama RIZKI MOCHAMMAD NUR HIDAYAT ;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk melakukan ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONVENSİ dengan rincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil_:

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT	Nominal	Keterangan



REKONVENSİ		
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 134.820.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan outstanding hutang per tgl 4 Januari 2021
Biaya Denda	Rp. 16.019.500,- (enam belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan nilai denda per tgl 4 Januari 2021
Biaya Kunjungan	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan visit fee per tgl 4 Januari 2021
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
JUMLAH	Rp. 200.959.500,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	-

Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ, maka PENGGUGAT REKONVENSİ mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Total kerugian :

Kerugian Materiil	Rp. 200.959.500,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh
-------------------	--



	sembilan ribu lima ratus rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
TOTAL KERUGIAN	Rp. 210.959.500,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uit verbaar bij vooraad);
11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII untuk patuh dan menjalankan putusan a quo ;
12. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini demi hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 9 Maret 2021 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pwr tertanggal 21 April 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pwr;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnyaberdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr.

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal Purworejo 20 Mei 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 23 Juni 2021 secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara baik Pembanding maupun Terbanding dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) banding secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding secara elektronik (*E-Court*) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini supaya menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa mohon seluruh uraian yang tertuang dalam putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam Memori banding ini;



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori banding secara elektronik (*E-Court*) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum pihak Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusann yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa dengan saksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. tanggal 21 April 2021 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat baik Pertimbangan maupun Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, namun sekedar mengenai amar biaya perkara haruslah diperbaiki bukan membebankan Penggugat membayar biaya perkara tetapi menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga amar selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. tanggal 21 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan memperbaiki redaksi Amar Putusan No. 3 Putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena pihak Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1365 BW pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan.



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 51/Pdt.G/2020/PN. Pwr. sekedar mengenai redaksi biaya perkara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pwr;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp 590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh kami **Santun Simamora, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dan **Sunardi, S.H.,** dan **I Nyoman Karma, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 3 Agustus 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Suharna, S.H.M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

S u n a r d i, S.H..

Santun Simamora, S.H. M.H.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suharna, S.H. MH.

Halaman 49 dari 49 Perkara No: 274/PDT/2021/PT.SMG



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +

Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)